



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Rahmat dan Karunia-Nya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

LAKIP ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, disusun berdasarkan surat Bupati Nias Selatan Nomor: 000.8.6.3/0723/ORB/I/2025 tanggal 08 Januari 2025 tentang Penyusunan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyelesaian Laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kami tidak menutup kritik dan saran yang diberikan kepada kami. Kami berharap, melalui pelaksanaan dan penyelesaian laporan ini, dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Teluk Dalam, 31 Januari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kab. Nias Selatan,



AFERILI HARITA, SE., MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680408 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Susunan Organisasi.....	3
D. Landasan Hukum	17
E. Sistematika Penyajian	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	21
B. Rencana Kerja (Renja) T.A. 2024	29
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	54
D. Perjanjian Kinerja (PK)	56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	59
B. Realisasi Anggaran	71
BAB IV PENUTUP.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dari beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistim manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sitem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (*Strategie Plan*). Rencana Kerja (*Perfomance Plan*), Penetapan Kinerja (*Perfomance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Perfomance Accountabiliti Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan di tahun mendatang.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, fungsi penunjang pendapatan dan aset daerah.

BPKPD Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan, memiliki fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi keuangan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup administrasi keuangan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup administrasi keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi :

KEPALA BADAN

1. Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan pendapatan, dan aset Daerah;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat1
 - (1) Kepala Badan melaksanakan fungsi:
 - (a) Perencanaan, pendapatan dan aset daerah serta kesekretariat;
 - (b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas badan;
 - (c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan;
 - (d) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - (e) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
 - (f) Penandatanganan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D);
 - (g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

SEKRETARIS

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. Pelayanan administrasi keuangan;
 - d. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b dibantu 3 (tiga) Subbagian terdiri dari:

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- (2) Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan badan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi;

BIDANG ANGGARAN

- (1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pembinaan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pembinaan;
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan serta evaluasi dan pembinaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Anggaran dibantu 3 (tiga) Sub Bidang terdiri atas:

- (1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis anggaran pendapatan, meliputi:
 1. Penyusunan kebijakan anggaran pendapatan APBD/ Perubahan APBD.
 2. Kode rekening urusan, organisasi, program, kegiatan.
 3. Data pendapatan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta perubahannya.
 4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

5. Nota keuangan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
 6. Rancangan anggaran kas pendapatan Perangkat Daerah/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 7. Penyusunan pergeseran anggaran pendapatan.
 8. Penatausahaan, penagihan dan penghapusan piutang.
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis anggaran pendapatan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis anggaran belanja dan pembiayaan, diantaranya :
 1. Penyusunan kebijakan anggaran belanja dan pembiayaan APBD/ Perubahan APBD.
 2. Petunjuk teknis penyusunan RKA.
 3. Data anggaran belanja dan pembiayaan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabaran APBD, serta perubahannya.
 4. Pergeseran anggaran belanja dan pembiayaan.
 5. Evaluasi rancangan RKA-PD/ PPKD dan rancangan DPA-PD/ PPKD.
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis anggaran belanja dan pembiayaan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Anggaran mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pembinaan anggaran;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis evaluasi dan pembinaan anggaran, meliputi:
 - 1. Melaksanakan penatausahaan lain-lain pendapatan asli daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.
 - 2. Pedoman pelaksanaan APBD.
 - 3. Pembinaan penyusunan anggaran.
 - 4. Evaluasi Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta anggaran kas belanja.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis evaluasi dan pembinaan anggaran;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BIDANG PERBENDAHARAAN

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perbendaharaan, kas daerah dan permodalan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan perbendaharaan, kas daerah dan permodalan;
 - c. Mengintervensi permasalahan yang berhubungan dengan perbendaharaan, kas daerah dan permodalan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- d. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan Tupoksi bidang perbendaharaan, kas daerah dan permodalan;
- e. Melakukan program kegiatan yang berhubungan dengan bidang perbendaharaan, kas daerah dan permodalan;
- f. Melaksanakan program dan kegiatan perbendaharaan, kas daerah dan permodalan;
- g. Menyiapkan penyusun statistik keuangan daerah (struktur APBD) beserta kode rekeningnya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perbendaharaan dibantu 3 (tiga) Sub Bidang terdiri atas :

- (1) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perbendaharaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan perbendaharaan;
 - c. Mengintervensi permasalahan yang berhubungan dengan perbendaharaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan Tupoksi urusan perbendaharaan;
 - e. Melakukan program kegiatan yang berhubungan dengan seksi perbendaharaan;
 - f. Menyiapkan dan merumuskan standar analisis biaya;
 - g. Melakukan pencatatan, penggolongan, penafsiran dan analisa, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan

dalam rangka pelaksanaan APBD berdasarkan sistim akuntansi keuangan daerah;

- h. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi laporan APBD, laporan aliran kas dan neraca daerah.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kas daerah sebagaimana pedoman dan landasan kerja;
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan kas daerah;
- c. Mengintervensi permasalahan yang berhubungan dengan kas daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan Tupoksi urusan kas daerah;
- e. Melakukan program kegiatan yang berhubungan dengan seksi kas daerah;
- f. Mensinkronkan posisi kas daerah dengan laporan kas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Permodalan mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permodalan sebagai pedoman dan landasan kerja.
- b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan permodalan.

- c. Mengintervensi permasalahan yang berhubungan dengan permodalan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan Tupoksi urusan permodalan.
- e. Melakukan program kegiatan yang berhubungan dengan urusan permodalan.
- f. Memfasilitasi pemberian permodalan kepada pengusaha pemula melalui dana hibah dan bantuan sosial.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf 3 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang akuntansi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang akuntansi;
 - b. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dibantu 3 (tiga) Sub Bidang terdiri atas:

(1) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan sesuai rencana kerja Badan;
- b. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi dokumen/bukti transaksi pendapatan;
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan data transaksi, pengiikhtisan pendapatan, identifikasi dan klasifikasi dokumen/ bukti transaksi pendapatan distribusi dokumen dan pengarsipan;
- d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pencatatan dan penggolongan transaksi pendapatan, rekonsiliasi data pendapatan dengan SKPD terkait serta melaporkan pendapatan secara periodik;
- e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan data laporan realisa pendapatan APBD triwulanan, semester I dan realisasi penerimaan APBD Tahunan;
- f. Meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan hal akuntansi pendapatan kas;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja sebagai acuan pelaksana tugas;
- b. Menyusun peraturan terkait akuntansi belanja dan akuntansi aset Pemerintah Daerah;
- c. Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi dokumen/ bukti transaksi belanja;

- d. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan data transaksi, pengikhtisaran belanja, identifikasi dan klasifikasi dokumen/bukti transaksi belanja;
 - e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pencatatan dan penggolongan transaksi belanja, rekonsiliasi data belanja dengan SKPD terkait serta laporan realisasi belanja secara periodik;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan dan akuntansi pada masing-masing SKPD;
 - h. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaporan belanja dan akuntansi aset BLUD serta pelaporan pengolahan dana non kas lainnya;
 - i. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaporan belanja dan akuntansi aset BLUD serta pelaporan pengelolaan dana non kas lainnya;
 - j. Melaksanakan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten;
 - k. Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh entitas akuntansi Pemerintah;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan evaluasi dan pembinaan akuntansi;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pembinaan akuntansi;
 - 1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan evaluasi dan pembinaan akuntansi;

2. Evaluasi realisasi anggaran.
3. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
4. Penatausahaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD.
6. Pelaksanaan pembinaan dan mbimbingan teknis penatausahaan dan akuntansi.
7. Penatausahaan investasi permanenn dan non permanen.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan evaluasi dan pembinaan akuntansi;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemindahtanganan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemindahtanganan;
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan, penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemindahtanganan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibantu 3 (tiga) Sub Bidang terdiri atas:

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah, meliputi:
 - 1. Koordinasi dan pelaksanaan teknis perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah.
 - 2. Pertimbangan atas pengajuan usulan perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah.
 - 3. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
 - 4. Pemeliharaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengelola;
 - c. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan teknis perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan barang milik daerah;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik daerah;

1. Koordinasi pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik daerah;
 2. Kegiatan inventarisasi penatausahaan barang milik daerah;
 3. Pembukuan dan penetapan status penggunaan;
 4. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan barang milik daerah;
 5. Pembinaan tertib administrasi penatausahaan barang milik daerah;
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penatausahaan barang milik daerah;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan dan pemindahtanganan;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengamanan dan pemindahtanganan;
 1. Koordinasi pelaksana teknis pengamanan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
 2. Pengamanan fisik, administratif, dan hukum.
 3. Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.
 4. Pelaksanaan penghapusan (pemindahtanganan atau pemusnahan) barang milik daerah.
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengamanan dan pemindahtanganan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

- (1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bidang perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pembukuan dan pelaporan;
 - b. Perencanaan program kegiatan bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan;
 - c. Perumusan sasaran bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan;
 - d. Penyediaan data dan informasi bidang Pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan;
 - e. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - f. Mengkoordinasikan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pendaftaran, Keberatan, Pembukuan dan Pelaporan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah dibantu 3 (tiga) Sub Bidang terdiri atas:

- (1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendaftaran dan pendataan subyek obyek pajak dan retribusi daerah serta penilaian nilai jual obyek pajak.
- (2) Sub Bidang Penetapan, Penagihan, dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Penghitungan, Penetapan, dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pencatatan pembukuan dan pelaporan pendapatan, dana-dana yang berasal dari pemerintah provinsi/pusat dan kompensasi paja/retribusi daerah.

D. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat dan Nias Selatan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
9. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Dearah Kabupaten Nias Selatan;
10. Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 000.8.6.3/0723/ORB/I/2025 tanggal 08 Januari 2025 tentang Penyusunan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah mengkomunikasikan pencapaian kinerja BPKPD selama satu tahun anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance result*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut maka sistematika penyajian LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2024 berupa Pengantar; Gambaran Umum, Data Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan nomor 01.5_58 Tahun 2016 meliputi: uraian tugas pokok, fungsi dan wewenang serta Sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program, Rencana Kerja, IKU, Perjanjian kinerja sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis BPKPD Kabupaten Nias Selatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, telah menyusun “Rencana Strategis Tahun 2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan program.

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah maka penyusunan Rencana Strategis BPKPD harus diselaraskan dengan Arah Kebijakan Pembangunan daerah Tahun 2024 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai.

1. Visi

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju dan sejahtera. Visi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi berbagai kalangan dan komponen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Nias Selatan. Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2019-2023

serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 dan melanjutkan pembangunan yang belum selesai periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021 maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap – IV Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

“NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”

Penjabaran dari Visi tersebut :

- **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Misi

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang ditentukan untuk mencapai Visi. Misi ini dirumuskan untuk mewujudkan Visi dengan mengambil langkah – langkah yang tidak hanya efektif tapi juga efisien. Visi tersebut dimanifestasikan kedalam 5 (lima) Misi sebagai berikut:

MISI :

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Kelima misi ini merupakan Penajaman Terhadap **Siwa Sanuwu Sihönö** dengan tetap menjaga konsistensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

3. Tujuan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. BPKPD secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun ke depan dengan diformulasikanya tujuan strategis dan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dengan ditetapkanya tujuan strategis BPKPD dapat mengukur sejauh mana visi, misi organisasi telah dicapai. Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan pengelolaan keuangan serta optimalisasi pemberdayaan aset daerah, untuk Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan.

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mengemban Visi dan Misi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, langka yang ditempuh adalah peningkatan yang dibarengi dengan pendayagunaan SDM Perencana Pembangunan yang handal, Penajaman fokus dan sasaran target serta meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait baik Instansi Horizontal maupun Pemerintah Daerah Propinsi dan Pusat.

Untuk mencapai tujuan/sasaran dalam peningkatan mutu pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah maka perlu ditempuh kebijakan dan strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan serta Optimalisasi Pemberdayaan Aset Daerah.
- b. Pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara efisien dan efektif serta proporsional;
- c. Pengelolaan belanja dilakukan dengan ketentuan/mekanisme yang berlaku.
- d. Melakukan perbaikan dalam pencatatan dan penyajian aset tanah;
- e. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pengelola barang daerah;
- f. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu melalui intensifikasi pemungutan dengan meningkatkan basis data obyek pajak dan wajib pajak daerah, mengintensifkan pemungutan retribusi daerah serta mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah
- g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana Perimbangan, yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah
- h. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal (investasi) untuk BUMD dan PT Bank Sumut, sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

5. Program

Mencapai sasaran target yang nyata dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan maka perlu implementasi yang dituangkan dalam program program yang sistematis terpadu dan

terarah. Untuk Tahun Anggaran 2024 BPKPD Kabupaten Nias Selatan mempunyai program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran harus didukung dengan tersedianya berbagai fasilitas sarana dan prasarana dan logistik kantor sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan kelancaran proses penunjang urusan Pemerintahan. Perlengkapan kantor yang tersedia dan memadai, meubiler kursi/meja kerja, Komputer untuk gedung kantor sangat mendukung serta memperlancar pelaksanaan tugas. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur sangat mendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian anggaran, meningkatkan pengendalian belanja daerah dan dana transfer, mengelola pembiayaan dan menyusun laporan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD sehingga terciptanya penganggaran yang baik, penatausahaan yang bersih dan pelaporan yang akuntabilitas.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Program ini

merupakan salah satu program prioritas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah program yang sangat mendukung dalam peningkatan dan penatausahaan pendapatan daerah, untuk meningkatkan realisasi dan penatausahaan pendapatan daerah perlu adanya berbagai dukungan sehingga hasil yang dicapai dapat semaksimal mungkin.

Tabel.2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan BPKPD T.A. 2022 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	b. Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			c. Penyusunan struktur anggaran yang berimbang (setiap tahun targetnya nol rupiah)	0	0	0	0	0
			d. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			e. Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			f. Persentase penyelesaian aset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	4%	8%	12%	16%	20%
			g. Persentase tanah aset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)	30%	45%	60%	75%	90%
			h. Persentase PAD terhadap APBD	3.41 %	3.42 %	3.47 %	3.48 %	3.50 %

Tabel.2.2. Indikator Kinerja BPKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	(84 M)	0	0	0	0	0	0
4	Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya		4 %	8 %	12 %	16 %	20 %	20 %
7	Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)	15 %	30 %	45 %	60 %	75 %	90 %	90 %
8	Persentase PAD terhadap APBD	1,14 %	3.41 %	3.42 %	3.47 %	3.48 %	3.50 %	3.50 %

B. RENCANA KERJA (RENJA) T.A. 2024

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada Tahun 2024 dilakukan perubahan Renja.

Alasan mendasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2024 adalah:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
3. Adanya pergeseran – pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Tabel 2.3

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan RENJA-PD Tahun 2024

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Nias Selatan

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan Renja SKPD				Sesudah Perubahan Renja SKPD				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju		Jenis Kegiatan A/B/C
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif		Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan; Nilai Lakip OPD	10 0% %	212.110.388.896		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan; Nilai Lakip OPD	10 0% %	205.737.599.443	- 6.372.789.453,00	10 0% %	124.505.145.321	
			Nilai Lakip OPD	8			Nilai Lakip OPD	8			8		
5.02 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 0 % %	50.637.150		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 0 % %	50.637.150	-	10 0 % %	52.500.000	

5.02 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BP KP AD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	7.500.000	BP KP AD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	7.500.000	-	2 Dok	7.500.000	
5.02 . 01 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BP KP AD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.500.000	BP KP AD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.500.000	-	1 Dok	7.500.000	
5.02 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BP KP AD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.473.000	BP KP AD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.473.000	-	1 Dok	7.500.000	
5.02 . 01 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BP KP AD	Jumlah Dokumen DP A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DP A-SKPD	1 Dok	7.441.650	BP KP AD	Jumlah Dokumen DP A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DP A-SKPD	1 Dok	7.441.650	-	1 Dok	7.500.000	

5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	BP KP AD	Jumlah Dokumen Perubahan DP A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DP A-SKPD	1 Dok	6.742.800	BP KP AD	Jumlah Dokumen Perubahan DP A-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DP A-SKPD	1 Dok	6.742.800	-	1 Dok	7.500.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BP KP AD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.615.300	BP KP AD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	6.615.300	-	1 laporan	7.500.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BP KP AD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.364.400	BP KP AD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	7.364.400	-	4 laporan	7.500.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	100 %	204.127.600.946		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat	100 %	197.598.838.293	6.528.762.653,00	100 %	118.841.434.001	

			Daerah				Daerah						
5.02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BP KP AD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bula n	204.099.0 19.946,00	BP KP AD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bula n	197.570.2 57.293,00	- 6.528.7 62.653, 00	14 Bula n	118.813.4 34.001	
5.02 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BP KP AD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	6.657.000	BP KP AD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	6.657.000	-	12 Dok	7.000.000	
5.02 . 01 . 2.02 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BP KP AD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	7.308.000	BP KP AD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	7.308.000	-	12 Dok	7.000.000	
5.02 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BP KP AD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Lapo ran	7.308.000	BP KP AD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 lapo ran	7.308.000	-	12 lapo ran	7.000.000	

5.02.01 .2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	BP KP AD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Lap oran	7.308.000	BP KP AD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 lapo ran	7.308.000	-	12 lapo ran	7.000.000	
5.02.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksanany a Administrasi Kepegawaian	10 0 %	200.050.0 00		Terlaksanany a Administrasi Kepegawaian	10 0 %	200.050.0 00	-	10 0 %	200.000.0 00	
5.02.01 .2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BP KP AD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Pak et	57.000.00 0	BP KP AD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Pak et	57.000.00 0	-	55 Pak et	145.000.000	
5.02.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BP KP AD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Ora ng	143.050.0 00	BP KP AD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Ora ng	143.050.0 00	-	10 Ora ng	55.000.000	
5.02.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksanany a Administrasi Umum	10 0 %	1.736.638 .800		Terlaksanany a Administrasi Umum	10 0 %	1.823.553 .000	86.914. 200,00	10 0 %	1.706.211 .320	

			Perangkat Daerah				Perangkat Daerah						
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BP KP AD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	38.701.100	BP KP AD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	38.701.100	-	12 Paket	20.000.000	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BP KP AD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	151.301.200	BP KP AD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	163.425.400	12.124.200,00	12 Paket	200.000.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BP KP AD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	361.160.500	BP KP AD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	361.160.500	-	12 Paket	176.211.320	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BP KP AD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	206.050.000	BP KP AD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	206.050.000	-	12 Paket	190.000.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BP KP AD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	213.666.000	BP KP AD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	213.666.000	-	12 Laporan	200.000.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BP KP AD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	765.760.000	BP KP AD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	840.550.000	74.790.000,00	12 Laporan	920.000.000	

5.02 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	10 0 %	5.402.600 .000		Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	10 0 %	5.426.600 .000	24.000. 000,00	10 0 %	3.425.000 .000	
5.02 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BP KP AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap oran	53.000.00 0	BP KP AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap oran	53.000.00 0	-	12 Lap oran	20.000.000	
5.02 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BP KP AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap oran	4.500.000 .000	BP KP AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap oran	4.500.000 .000	-	12 Lap oran	2.550.000.0 00	
5.02 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BP KP AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap oran	849.600.0 00	BP KP AD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap oran	873.600.0 00	24.000. 000,00	12 Lap oran	855.000.000	
5.02 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	10 0 %	592.862.0 00		Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	10 0 %	637.921.0 00	45.059. 000,00	10 0 %	280.000.0 00	
5.02 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	BP KP AD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	12 Unit	442.770.0 00	BP KP AD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	12 Unit	442.770.0 00	-	12 Unit	185.000.000	

	Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
5.02 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BP KP AD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.092.000,00	BP KP AD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	195.151.000,00	45.059.000,00	1 Unit	95.000.000		
5.02 . 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun;	Te pa t W akt u	Wakt u	471.219.173.695	Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun;	Te pa t W akt u	Wakt u	471.300.363.560	81.189.865,00	Te pa t W akt u	Wakt u	475.251.212.076
			Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu;	Te pa t W akt u	Wakt u		Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu;	Te pa t W akt u	Wakt u			Te pa t W akt u	Wakt u	
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah;	W TP	Opini		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah;	W TP	Opini			W TP	Opi ni	
			Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0 ru pia h	Rupi ah		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0 ru pia h	Rupi ah			0 ru pia h	Rup iah	

			(setiap tahun targetnya nol rupiah);				(setiap tahun targetnya nol rupiah);						
			Persentase Realisasi APBD yang Telah Ditetapkan;	Pe rs en %			Persentase Realisasi APBD yang Telah Ditetapkan;	Pe rs en %			Pe rs en %		
			Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Te pa t W akt u Wakt u			Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Te pa t W akt u Wakt u			Te pa t W akt u Wa ktu		
5.02 . 02 . 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	10 0 %	899.984.2 00		Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	10 0 %	959.924.2 00	59.940. 000,00	10 0 %	998.784.0 00	
5.02 . 02 . 2.01 . 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BP KP AD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	3 Dok ume n	83.056.25 0	BP KP AD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	3 Dok ume n	83.056.25 0	-	3 Dok ume n	46.818.000	
5.02 . 02 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BP KP AD	Jumlah Dokumenn Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	3 Dok ume n	78.363.95 0	BP KP AD	Jumlah Dokumenn Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	3 Dok ume n	78.363.95 0	-	3 Dok ume n	46.818.000	
5.02 . 02 . 2.01 . 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BP KP AD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dok ume n	20.500.00 0	BP KP AD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dok ume n	20.500.00 0	-	3 Dok ume n	15.606.000	
5.02 . 02 . 2.01 . 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BP KP AD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang	3 Dok ume n	20.500.00 0	BP KP AD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang	3 Dok ume n	20.500.00 0	-	3 Dok ume n	15.606.000	

			Diverifikasi				Diverifikasi						
5.02 . 02 . 2.01 . 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BP KP AD	Jumlah DP A-SKPD yang Diverifikasi	3 Dok ume n	5.500.000	BP KP AD	Jumlah DP A-SKPD yang Diverifikasi	3 Dok ume n	5.500.000	-	3 Dok ume n	15.606.000	
5.02 . 02 . 2.01 . 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BP KP AD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dok ume n	5.500.000	BP KP AD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dok ume n	5.500.000	-	3 Dok ume n	15.606.000	
5.02 . 02 . 2.01 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BP KP AD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dok ume n	356.909.5 00	BP KP AD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dok ume n	356.909.5 00	-	4 Dok ume n	405.756.000	
5.02 . 02 . 2.01 . 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BP KP AD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dok ume n	317.654.5 00	BP KP AD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dok ume n	377.594.5 00	59.940. 000,00	4 Dok ume n	405.756.000	
5.02 . 02 . 2.01 . 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BP KP AD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	12 Ora ng	12.000.00 0,00	BP KP AD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	12 Ora ng	12.000.00 0,00	-	12 Ora ng	31.212.00 0	

			Pemerintah Kabupaten/Kot a				Pemerintah Kabupaten/Kot a						
5.02 . 02 . 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendahara an Daerah	10 0 %	802.461.0 00		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendahara an Daerah	10 0 %	802.457.0 00	- 4.000,0 0	10 0 %	648.689.4 00	
5.02 . 02 . 2.02 . 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok ume n	203.135.0 00	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok ume n	203.135.0 00	-	12 Dok ume n	202.878.000	
5.02 . 02 . 2.02 . 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Lap oran	5.066.250	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Lap oran	5.066.250	-	12 Lap oran	11.964.600	
5.02 . 02 . 2.02 . 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dok ume n	18.415.00 0,00	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dok ume n	18.611.00 0,00	196.00 0,00	4 Dok ume n	16.126.20 0	
5.02 . 02 . 2.02 . 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaa n Pembiayaan	12 Dok ume n	50.015.00 0	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaa n Pembiayaan	12 Dok ume n	50.015.00 0	-	12 Dok ume n	15.606.000	

			Daerah				Daerah						
5.02.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	79.045.250	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	129.845.250	50.800.000,00	161.262.000
5.02.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	Dokumen	51.000.000	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12	Dokumen	0	51.000.000,00	62.424.000

5.02.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BP KP AD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Lap oran	150.322.000	BP KP AD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Lap oran	150.322.000	-	12	Lap oran	36.414.000	
5.02.02.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12	Dok ume n	19.955.000	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12	Dok ume n	19.955.000	-	12	Dok ume n	93.636.000	

5.02.02 .2.02. 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D denganInstansi Terkait	12 Dok ume n	55.120.00 0	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D denganInstansi Terkait	12 Dok ume n	55.120.00 0	-	12 Dok ume n	5.202.000	
5.02.02 .2.02. 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BP KP AD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungja waban Sub Kegiatan	2 Dok ume n	20.300.00 0	BP KP AD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungja waban Sub Kegiatan	2 Dok ume n	20.300.00 0	-	2 Dok ume n	6.762.600	
5.02.02 .2.02. 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BP KP AD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaa n Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kot	4 Ora ng	150.087.5 00	BP KP AD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaa n Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kot	4 Ora ng	150.087.5 00	-	4 Ora ng	36.414.00 0	

			a				a						
5.02 . 02 . 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	10 0 %	800.008.1 50		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	10 0 %	800.008.1 00	- 50,00	10 0 %	941.856.5 11	
5.02 . 02 . 2.03 . 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Lap oran	45.575.20 0	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Lap oran	45.575.20 0	-	12 Lap oran	67.626.000	
5.02 . 02 . 2.03 . 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dok ume n	0,00	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dok ume n		-	12 Dok ume n	53.060.400	
5.02 . 02 . 2.03 . 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BP KP AD	Jumlah Laporan Pertanggungja wa	12 Lap oran	27.116.20 0	BP KP AD	Jumlah Laporan Pertanggungja wa	12 Lap oran	27.116.20 0	-	12 Lap oran	98.838.000	

	Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BP KP AD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Lap oran	272.265.000	BP KP AD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Lap oran	261.345.000	- 10.920.000,00	12 Lap oran	119.646.000
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BP KP AD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dok ume n	220.880.900	BP KP AD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dok ume n	220.880.900	-	4 Dok ume n	327.726.000

5.02 . 02 . 2.03 . 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BP KP AD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tin dak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD	2	Dok ume n	0,00	BP KP AD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tin dak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD	2	Dok ume n	-	2	Dok ume n	36.414.000		
5.02 . 02 . 2.03 . 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah	12	Dok ume n	234.170.8 50	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah	12	Dok ume n	245.090.8 00	10.919. 950,00	12	Dok ume n	207.334.111	
5.02 . 02 . 2.03 . 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD	2	Dok ume n	0,00	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD	2	Dok ume n	-	-	2	Dok ume n	31.212.000	
5.02 . 02 . 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tersedianya Penunjang Pengelolaan Keuangan	10 0	%	468.553.3 05.345		Tersedianya Penunjang Pengelolaan Keuangan	10 0	%	468.553.3 05.345	-	10 0	%	472.557.8 42.165	

5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Lap oran	465.073.549.280,00	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Lap oran	465.073.549.280,00	-	12 Lap oran	456.570.586.100	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Lap oran	2.500.000.000,00	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Lap oran	2.500.000.000,00	-	12 Lap oran	15.000.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Lap oran	979.756.065,00	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Lap oran	979.756.065,00	-	12 Lap oran	987.256.065	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Tersedianya Data dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100 %	163.415.000		Tersedianya Data dan Terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100 %	184.668.915	21.253.915,00	100 %	104.040.000	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	12 Dokumen	97.500.000	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	12 Dokumen	97.500.000	-	12 Dokumen	67.626.000	

			Keuangan Daerah				Keuangan Daerah						
5.02.02.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BP KP AD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	65.915.000	BP KP AD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	87.168.915	21.253.915,00	2 Orang	36.414.000	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD);	Ada	800.526.478		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD);	Ada	800.526.478	-	Ada	2.000.000.000	
			Persentase penyelesaian asset pemda/ BMD yang tidak diketahui keberadaannya;	8 %			Persentase penyelesaian asset pemda/ BMD yang tidak diketahui keberadaannya;	8 %			8 %		
			Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian	45 %			Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian	45 %			45 %		

			aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)				aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)						
5.02.03 .2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	10 0 %	800.526.4 78		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	10 0 %	800.526.4 78	-	10 0 %	2.000.000 .000	
5.02.03 .2.01. 01	Penyusunan Standar Harga	BP KP AD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dok ume n	80.329.37 0	BP KP AD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dok ume n	80.329.37 0	-	2 Dok ume n	275.000.000	
5.02.03 .2.01. 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BP KP AD	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah	12 Lap oran	190.628.8 63	BP KP AD	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah	12 Lap oran	190.628.8 63	-	12 Lap oran	355.000.000	
5.02.03 .2.01. 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Lap oran	44.972.96 0	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Lap oran	44.972.96 0	-	12 Lap oran	299.000.000	
5.02.03 .2.01. 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Lap oran	383.971.1 20	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Lap oran	383.971.1 20	-	12 Lap oran	465.000.000	
5.02.03 .2.01. 08	Penilaian Barang Milik Daerah	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12 Lap oran	82.363.55 5	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12 Lap oran	82.363.55 5	-	12 Lap oran	238.000.000	

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah						
5.02 . 03 . 2.01 . 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dok umen	18.260.61 0,00	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dok umen	18.260.61 0,00	-	12 Dok umen	368.000.0 00	
5.02 . 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase PAD terhadap APBD	3. 47 %	700.000.0 95	Persentase PAD terhadap APBD	3. 47 %	829.960.9 45	129.96 0.850,0 0	3.4 7 %	1.000.000 .000	
5.02 . 04 . 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Meningkatnya Pendapatan Daerah	10 0 %	700.000.0 95	Meningkatnya Pendapatan Daerah	10 0 %	829.960.9 45	129.96 0.850,0 0	10 0 %	1.000.000 .000	
5.02 . 04 . 2.01 . 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	BP KP AD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Do kum en	8.526.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Do kum en	8.526.000 ,00	-	12 Do kum en	57.000.00 0	

5.02.04 .2.01. 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Do kum en	294.396.7 10	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Do kum en	294.396.7 10	-	12 Do kum en	65.000.000	
5.02.04 .2.01. 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BP KP AD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Lap oran	11.909.00 0	BP KP AD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Lap oran	141.869.8 50	129.96 0.850,0 0	12 Lap oran	175.000.000	
5.02.04 .2.01. 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BP KP AD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Uni t	51.712.50 0	BP KP AD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Uni t	51.712.50 0	-	12 Uni t	65.000.000	
5.02.04 .2.01. 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Lap oran	25.600.60 0	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Lap oran	25.600.60 0	-	12 Lap oran	175.000.000	
5.02.04 .2.01. 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,	12 Lap oran	75.190.25 5	BP KP AD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,	12 Lap oran	75.190.25 5	-	12 Lap oran	35.000.000	

			dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						
5.02 . 04 . 2.01 . 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BP KP AD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12 Ob yek Paja k	14.873.50 0	BP KP AD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12 Ob yek Paja k	14.873.50 0	-	12 Ob yek Paja k	100.000.000	
5.02 . 04 . 2.01 . 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BP KP AD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dok ume n	14.843.16 0	BP KP AD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dok ume n	14.843.16 0	-	2 Dok ume n	35.000.000	
5.02 . 04 . 2.01 . 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BP KP AD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Lay ana n	49.995.20 0	BP KP AD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Lay ana n	49.995.20 0	-	12 Lay ana n	37.000.000	
5.02 . 04 . 2.01 . 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	BP KP AD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Do kum en	19.972.50 0	BP KP AD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Do kum en	19.972.50 0	-	12 Do kum en	35.000.000	
5.02 . 04 . 2.01 . 11	Penagihan Pajak Daerah	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Do kum en	70.870.55 0	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Do kum en	70.870.55 0	-	12 Do kum en	110.000.000	
5.02 . 04 . 2.01 . 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Do kum en	14.999.37 0	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Do kum en	14.999.37 0	-	12 Do kum en	45.000.000	

5.02 . 04 . 2.01 . 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Do kum en	47.110.75 0	BP KP AD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Do kum en	47.110.75 0	-	12 Do kum en	66.000.000	
Jumlah Total Pagu					684.830.0 89.164				678.668.4 50.426			602.756.35 7.397	

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.2.4. Indikator Kinerja Utama BPKPD Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	IKU	SATUAN	Formula /Cara pemakaian	Sumber Data	Keterangan / Kinerja
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	BPKPD	WTP
2		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Waktu	Ketepatan Waktu dan Lamanya Waktu Pelaksanaan Perda APBD dan PAPBD	BPKPD	Tepat Waktu
3		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	Rupiah	Keseimbangan Antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada APBD	BPKPD	0
4		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	Waktu	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD	BPKPD	Tepat Waktu
5		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD)	Ada/ Tidak Ada	Ketersediaan Aplikasi Penatausahaan BMD	BPKPD	Ada
6		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	Persentase	Peningkatan Persentase BMD yang diinventarisasi	BPKPD	12%
7		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)	Persentase	Peningkatan Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang telah tersertifikasi	BPKPD	60%
8		Persentase PAD terhadap APBD	Persentase	Peningkatan Persentase PAD Pemerintah Daerah	BPKPD	3.47%

D. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dengan telah diterbitkannya Peraturan MENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan penetapan kinerja adalah

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja BPKPD disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2024.

Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang telah mengacu pada Rencana Strategis BPKPD tahun 2021 – 2026.

a. Perjanjian Kinerja BPKPD T.A.2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0
		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	Tepat Waktu
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	12%
		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan	60%
		Persentase PAD terhadap APBD	3,47%

b. Program Kegiatan dan Pagu Anggaran BPKPD T.A. 2024

PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	212.110.388.896	231.636.255.950,39
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	471.219.173.695	493.753.532.359,61
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	800.526.478	1.310.161.213,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	700.000.095	929.963.750,00
JUMLAH ANGGARAN	684.830.089.164	727.629.913.273

Pagu anggaran murni BPKPD T.A. 2024 mengalami perubahan pada saat PAPBD T.A. 2024 dimana anggaran setelah perubahan bertambah sebesar Rp. 42.799.824.109.

Tabel. 2.5. Tabel Kesesuaian antara indikator dan target pada
RPJM, Renstra, IKU dan PK

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2024			
				RPJM D	RENSTR A	IKU	PK
1	2	3	4	5			
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
			b. Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			c. Penyusunan struktur anggaran yang berimbang (setiap tahun targetnya nol rupiah)	0	0	0	0
			d. Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			e. Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD)	Ada	Ada	Ada	Ada
			f. Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	12%	12%	12%	12%
			g. Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)	60%	60%	60%	60%
			h. Persentase PAD terhadap APBD	3.47%	3.47%	3.47 %	3.47 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja tingkat kegiatan, selanjutnya pencapaian kinerja sasaran evaluasi dengan membandingkan target sasaran dengan realisasi capaian sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD, IKU dan Perjanjian Kinerja.

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100	BPKPD Kab. Nias Selatan
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	BPKPD Kab. Nias Selatan
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0	0	100	BPKPD Kab. Nias Selatan
		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	BPKPD Kab. Nias Selatan
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada	Ada	100	BPKPD Kab. Nias Selatan
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	12%	0%	0	BPKPD Kab. Nias Selatan

	Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan	60%	22,65%	38	BPKPD Kab. Nias Selatan
	Persentase PAD terhadap APBD	3,47%	2,85%	82	BPKPD Kab. Nias Selatan

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	100
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0	0	0	0	100
		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	100
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya		0%	12%	0%	0
		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan	20%	45%	60%	22,65%	38
		Persentase PAD terhadap APBD	2,81%	2,52%	3,47 %	2,85%	82

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0	0	100%
		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada	Ada	100%
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	0%	20%	0%
		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan	38%	90%	42%
		Persentase PAD terhadap APBD	2,85%	3,50%	81%

3.1.4. Analisis Penyebab Kegagalan/Keberhasilan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et	Realis asi	Capaian %	Analisis Keberhasila n/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakuka n
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100	Keberhasilan : Pengelolaan Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Aturan Pengelolaan Keuangan yang berlaku	
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepa t Wakt u	Tepat Waktu	100	Keberhasilan : Penetapan Perda APBD dan PAPBD telah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan	
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	0	0	100	Keberhasilan : Tercapainya Penyusunan Anggaran yang berimbang dimana Penyusunan Anggaran Pendapatan dapat memenuhi pendanaan Anggaran belanja yang telah ditetapkan pada APBD dan PAPBD secara terstruktur	

		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Keberhasilan : Penetapan Perda APBD dan PAPBD telah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan	
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada	Ada	100	Keberhasilan : Manajemen Barang Milik Daerah dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku	
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	12%	0%	0	Kegagalan: Belum teridentifikasinya aset yang tidak diketahui keberadaannya	Aset yang tidak teridentifikasi diakui dalam Laporan Keuangan sebagai aset lain-lain
		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan	60%	22,65 %	38	Keberhasilan : Terbitnya Sertifikat atas kepemilikan tanah Pemerintah Daerah	
		Persentase PAD terhadap APBD	3,47 %	2,85%	82	Keberhasilan : Meningkatnya Persentase PAD terhadap APBD	

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis (PK)	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	HASIL PERKALIAN CAPAIAN KINERJA DAN PAGU	HASIL PENGURANGAN DENGAN SERAPAN
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian Serapan			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	1.300.266.300	1.271.198.858	98%	2,3%	1.300.266.300,00	29.067.442
	Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	1.367.653.995	1.351.920.247	99%	1,2%	1.367.653.995,00	15.733.748
	Penyusunan struktur anggaran yang berimbang (setiap tahun targetnya nol rupiah)	0	0	100%	1.367.653.995	1.351.920.247	99%	1,2%	1.367.653.995,00	15.733.748
	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	1.300.266.300	1.271.198.858	98%	2,3%	1.300.266.300,00	29.067.442
	Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah	Ada	Ada	100%	1.310.161.213	1.277.862.217	98%	2,5%	1.310.161.213,00	32.298.996
	Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	12%	0	0%	1.310.161.213	1.277.862.217	98%	100,0%	-	1.277.862.217

Persentase tanah aset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)	60 %	23%	38%	1.310.161.213	1.277.862.217	98%	61,3 %	494.585.857,91	783.276.359
Persentase PAD terhadap APBD	3,47%	2,85 %	82%	929.963.750	915.900.642	98%	16,6 %	763.803.079,97	152.097.562

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	98	Menunjang	
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	100	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	99	Menunjang	
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang	100	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	99	Menunjang	
		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	100	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	98	Menunjang	
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik	100	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	98	Menunjang	

		daerah					
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	60	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	98	Menunjang
		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan	42	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	98	Menunjang
		Persentase PAD terhadap APBD	81	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	98	Menunjang

Indikator Kinerja 1:

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan berupaya semaksimal mungkin agar selalu tertib administrasi dan selalu menghimbau seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan pelaksanaan realisasi anggaran dengan mempedomani ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan kementerian-kementerian terkait, dimana pada T.A. 2023 Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Nias Selatan adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tercapainya target opini WTP untuk Laporan Keuangan Kabupaten Nias Selatan TA. 2023 berkat upaya dan komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh perangkat daerah/stakeholder yang terlibat langsung maupun tidak langsung, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan dengan melebihi target yang telah ditetapkan pada RPJMD dari target WDP untuk Tahun 2023.

Demikian untuk hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah T.A. 2024 masih belum dapat disajikan dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara hingga dokumen LAKIP ini diselesaikan. Maka BPKPD tidak dapat menyajikan realisasi dari target opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada dokumen ini dimana target opini BPK pada RPJMD adalah WTP untuk Tahun 2024 dan tidak menutup kemungkinan untuk mencapai kembali target WTP seperti pada tahun 2023.

Indikator Kinerja 2:

Sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terlaksana tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPKPD T.A. 2024, dimana proses ini dilaksanakan dimulai saat ditetapkannya KUA-PPAS hingga pada penetapan APBD dan dilanjutkan pada penyusunan RKA dan DPA, dan begitu juga proses pelaksanaan pada penyusunan PAPBD, dan semua proses ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama oleh TAPD untuk mendukung percepatan penetapan APBD Kabupaten Nias Selatan T.A. 2024 yang berkualitas dan tepat guna, tepat sasaran.

Indikator Kinerja 3:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2024 telah dimaksimalkan, dalam penyusunan struktur anggaran untuk mencapai penyusunan anggaran yang berimbang dimana pagu Anggaran Pendapatan pada pergeseran setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.560.183.438.647,37,- mampu memenuhi kebutuhan pagu Anggaran Belanja yang telah ditetapkan

sebesar Rp. 1.730.280.463.148,- dengan nilai Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 170.097.024.500,63,- dan Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.000.000.000,- sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah tahun berkenaan sebesar Rp. 0,-, dengan demikian target yang telah ditetapkan pada RPJMD, IKU dan Perjanjian Kinerja telah tercapai.

Indikator Kinerja 4:

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Indeks Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu BPKPD telah mengambil Langkah-langkah percepatan dan strategis untuk menghimpun seluruh Laporan Keuangan Perangkat Daerah secara real-time sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan Tepat Waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD, IKU dan Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja 5:

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan khususnya aset daerah maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan penggunaan perangkat lunak yaitu Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Dimana bekerjasama dengan BPKP – RI Perwakilan Sumatera Utara sehingga dapat menghasilkan dan mendukung penatausahaan Barang Milik Daerah dengan baik di Tahun Anggaran 2024.

Indikator Kinerja 6:

Dalam hal target kinerja pada indikator Kinerja Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya yang capaiannya adalah nol dikarenakan masih belum ditemukan

keberadaannya dan aset tersebut sudah bernilai nol akan tetapi aset tersebut dicatat dalam kelompok aset lain-lain dalam laporan keuangan yang rencananya akan dilakukan pengusulan untuk penghapusan aset sesuai dengan aturan yang berlaku.

Indikator Kinerja 7:

Salah satu Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan ialah Presentase Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Bersertifikat, dari Indikator ini telah ditargetkan 60% tanah tersertifikat selama Tahun 2024. akan tetapi tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaannya, yaitu sulitnya para petugas dilapangan untuk memetakan lahan yang sebagian telah diklaim / dikuasai oleh masyarakat, terjadinya banyak keberatan dan perlawanan dari beberapa oknum masyarakat yang merasa memiliki tanah Pemerintah. Dari beberapa kendala diatas dapat disimpulkan bahwa masih perlunya Upaya Pemerintah Daerah untuk mempertegas regulasi-regulasi yang ada, sehingga masyarakat dapat mengerti dan taat aturan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Kinerja 8:

Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,85% dengan nilai Rp. 44.533.218.660,34 (unaudited) dari total keseluruhan Pendapatan Daerah dengan nilai Rp. 1.564.932.391.168,34 (unaudited), dimana untuk target persentase PAD terhadap APBD berdasarkan target pada RPJMD sebesar 3.47% tidak tercapai, namun perlu diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah jika dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan pada APBD dimana target PAD pada APBD sebesar Rp. 22.062.368.430,37 dan capaian realisasi sebesar 44.533.218.660,34 sehingga dapat disimpulkan bahwa

Capaian Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2024 melebihi target dari target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun 2024.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu program atau kegiatan tahun anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Mendapat Alokasi Dana kegiatan sebagai berikut:

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	231.636.255.950,39	185.687.395.353	80%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.637.150	49.066.105	97%
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.495.275	100%
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000	7.284.400	97%
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.473.000	7.455.675	100%
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.441.650	6.181.650	83%
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.742.800	6.703.425	99%
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.615.300	6.605.850	100%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.364.400	7.339.830	100%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	221.589.737.445,39	176.693.986.057	80%

5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	221.561.156.445,39	176.665.808.782	80%
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.657.000	6.645.975	100%
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.308.000	7.281.225	100%
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.308.000	7.287.525	100%
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.308.000	6.962.550	95%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.050.000	154.429.657	77%
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.000.000	56.610.000	99%
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	143.050.000	97.819.657	68%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.661.880.955	3.590.630.481	98%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63.703.500	57.706.600	91%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	475.245.400	474.430.300	100%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	873.167.100	867.755.050	99%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	463.149.955	431.629.350	93%
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	391.866.000	391.525.000	100%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.394.749.000	1.367.584.181	98%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.991.600.000	4.315.030.978	86%

5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000.000	100.000.000	100 %
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000.000	3.347.430.978	84%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	891.600.000	867.600.000	97%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.350.400	884.252.075	77%
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	947.199.400	689.663.075	73%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.151.000	194.589.000	100 %
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	493.753.532.359,61	476.694.972.649	97%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.367.653.995	1.351.920.247	99%
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	95.566.450	94.425.275	99%
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	78.363.950	78.059.065	100 %
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	20.500.000	19.909.450	97%
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	20.500.000	20.282.000	99%
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5.500.000	5.499.750	100 %
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5.500.000	5.498.700	100 %

5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	510.125.970	505.181.542	99%
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	619.597.625	611.569.765	99%
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12.000.000	11.494.700	96%
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	977.524.200	941.383.745	96%
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	276.005.000	273.799.524	99%
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.066.250	5.066.250	100%
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	18.611.000	18.536.000	100%
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	55.020.000	54.999.000	100%
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	166.965.250	166.910.857	100%
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	0%

5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	160.192.000	160.097.158	100 %
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	19.955.000	19.828.318	99%
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	55.120.000	55.006.225	100 %
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	70.502.200	52.861.658	75%
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150.087.500	134.278.755	89%
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.300.266.300	1.271.198.858	98%
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	104.127.000	103.766.207	100 %

5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	-	-	0%
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	316.937.450	314.648.009	99%
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	261.345.000	260.998.528	100%
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	297.030.000	296.369.092	100%
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	0%
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	320.826.850	295.417.022	92%
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	-	0%
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	489.880.218.950	472.905.038.999	97%
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	475.721.389.280	472.905.038.999	99%

5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.171.573.605	-	0%
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	987.256.065	-	0%
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	227.868.915	225.430.800	99%
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	97.500.000	95.889.300	98%
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	130.368.915	129.541.500	99%
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.310.161.213	1.277.862.217	98%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.310.161.213	1.277.862.217	98%
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	80.329.370	79.387.600	99%
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	268.827.353	268.207.310	100%
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	44.972.960	36.855.378	82%
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	584.004.180	583.209.648	100%
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	313.766.740	292.023.340	93%
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	18.260.610	18.178.941	100%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	929.963.750	915.900.642	98%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan	929.963.750	915.900.642	98%

	Pendapatan Daerah			
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	8.526.000	8.452.500	99%
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	294.396.655	293.581.961	100 %
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	141.869.850	135.457.780	95%
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	51.712.500	51.637.500	100 %
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	25.600.600	24.900.600	97%
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	75.190.255	75.190.255	100 %
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	88.446.500	87.857.500	99%
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	14.843.160	14.795.160	100 %
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	76.425.060	76.366.966	100 %
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	19.972.500	19.772.500	99%
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	70.870.550	70.614.800	100 %
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	14.999.370	14.999.370	100 %
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	47.110.750	42.273.750	90%
TOTAL		727.629.913.273	664.576.130.861	91%

BAB IV

PENUTUP

A. KENDALA / HAMBATAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan penilaian atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2024, bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran adalah 91% dan Persentase Capaian Kinerja adalah 98%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat capaian sasaran BPKPD Kabupaten Nias Selatan sangatlah berhasil. Dan masih adanya beberapa hal yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia disetiap perangkat daerah khususnya yang bergerak dibagian pengelolaan keuangan perangkat daerah;
2. Masih perlunya peningkatan penyuluhan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam rangka pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan dimasa yang akan datang perlu peningkatan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai, mengefektifkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Nias Selatan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan

kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara rutin, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan bagi keberhasilan capaian kinerja serta merespon secara cepat perubahan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Nias Selatan,



AFERILI HARITA, SE., MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680408 200502 1 001